

## **BAB 2**

### **MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU CARA RESOLUSI KONFLIK**

Konflik kekerasan adalah salah satu dari hambatan-hambatan terbesar dalam upaya mencapai kemajuan manusia dan pembangunan. Konflik kekerasan tidak saja menimbulkan banyak kematian dan luka-luka, tetapi juga kehidupan politik yang tidak stabil menghambat lembaga-lembaga ekonomi dan pembangunan ekonomi sosial. Apabila konflik terjadi di suatu negara maka bisa berdampak pada beberapa bidang seperti pada bidang :

#### a. Ekonomi

Dampak konflik yang dirasakan dalam bidang ekonomi ialah : menurunnya jumlah uang yang beredar, berkurangnya lapangan pekerjaan, menurunnya penerimaan daerah, menurunnya pendapatan masyarakat, terganggunya kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah-daerah konflik.

#### b. Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya dampak konflik yang dirasakan berupa : terjadinya segregasi masyarakat berdasarkan kategori isu konflik, munculnya gelombang pengungsian, gangguan kesehatan, terganggunya proses pendidikan, serta trauma psikologis khususnya pada anak-anak dan perempuan dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

#### c. Infrastruktur

Kerusakan-kerusakan infrastruktur yang terjadi merupakan dampak material yang paling berat akibat konflik karena kegagalan penanganan pada tahap pra konflik.

#### d. Politik dan Pemerintahan

Melemahnya fungsi kelembagaan pemerintahan, menurunnya pelayanan kepada masyarakat, membengkaknya pembelanjaan pemerintah, terganggunya pranata politik yang ada, menguatnya gejala separatisme dan lain-lain. Proses transisi politik dan sosial-ekonomi mempengaruhi pula dampak-dampak konflik politik dan pemerintahan ini sehingga privatisasi keamanan (milisi-milisi sipil) dan kekerasan telah meningkat secara dramatis bersamaan tumbuhnya panglima

perang lokal pada aktivitas gerilya narkoba, prajurit indisipliner, perusahaan-perusahaan swasta ilegal di bidang keamanan.<sup>10</sup>

Negara yang terlibat konflik sering menunjukkan ketinggalan, bukan kemajuan, dari sisi indikator ekonomi dan sosial. Karena itu, memahami akar penyebab konflik, dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi angka kematian, sangat penting untuk meningkatkan pembangunan manusia. Penting sekali untuk memahami penyebab konflik, mengingat sangat banyaknya konflik politik yang terjadi di dunia saat ini.

Sebagian besar konflik sekarang ini terjadi di dalam negeri meski seringkali ada intervensi yang cukup besar dari luar. Konflik dalam negeri meningkat dengan tajam sejak tahun 1950. Kerugian sangat besar dalam perang seperti itu, korban cedera di kalangan penduduk sipil (yaitu mereka yang tidak aktif ikut berperang) sangat besar. Tidak saja bahwa penduduk sipil sengaja dijadikan sasaran, tetapi juga bahwa akibat-akibat tidak langsung dari perang – perekonomian menjadi kacau karena perang – membawa dampak terutama pada penduduk sipil.

Bab ini akan me-*review* literatur-literatur mengenai resolusi konflik untuk mencapai perdamaian. Dalam bab ini juga akan me-*review* literatur mediasi sebagai salah satu cara resolusi konflik.

## **2.1. Penyebab konflik**

Penyebab konflik bisa dilihat dari berbagai sisi yaitu sisi budaya, sisi ekonomi, dan sisi politik.

### **2.1.1. Unsur Budaya**

Penjelasan populer mengenai kekerasan mengatakan perbedaan budaya atau suku sebagai penyebab utama – bahwa ada kecenderungan turun temurun dari orang dari berbagai budaya untuk baku hantam, untuk menguasai atau memperoleh otonomi. Pandangan ini telah dirangkum dalam ramalan Huntington yang terkenal mengenai 'pertarungan budaya'. Kalau Huntington menerapkan ini

---

<sup>10</sup> Mawardi, Dr.Ir.Moch.Ikhwanuddin, (2005), *Strategi Dasar Penanganan Daerah Konflik di Indonesia*, <http://pda-undp.tripod.com/plenary52.pdf>.

pada perpecahan global antara barat modern dengan pihak lain (terutama Muslim), pandangan yang sama digunakan pula untuk menjelaskan konflik mematican di dalam negeri.

Perang dipicu semangat kesukuan primordial, sehingga perang tidak terelakkan dan sulit diatasi. Kesukuan jelas digunakan sebagai instrumen dalam konflik. Menggunakan kesukuan dan mempertebal identitas kesukuan adalah mekanisme dan sangat ampuh bagi para pemimpin untuk memperoleh nasib sendiri. Perbedaan persepsi mengenai identitas sering digunakan oleh elit politik dan intelektual sebelum dan selama konflik international dan di dalam negeri (misalnya Turton 1997; Alexander, MecGregor et al 2000).

Namun harus ada perasaan ada perbedaan dalam perilaku, adat istiadat, ideologi atau agama, yang memungkinkan sebagai instrumen, misalnya berbahasa sama, memiliki tradisi budaya yang sama, atau menghadapi sumber kesulitan hidup atau penindasan yang sama. Apapun asal-usul sebuah kelompok, perbedaan identitas tampak nyata bagi anggotanya – inilah sebabnya mengapa identitas kelompok demikian kuat sebagai pendorong untuk bertindak. Seperti kata Turton, 'efektif tidaknya (suku) sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tergantung pada apakah suku dilihat sebagai "primordial" oleh orang yang mengajukan tuntutan atas nama suku'(Turton 1997:82).

Namun, perbedaan budaya sendiri saja tidak cukup untuk menjelaskan perkelahian dengan kekerasan karena perbedaan semacam itu baru tampak menonjol bila perbedaan lain (politik/ekonomi) juga ada.<sup>11</sup>

### **2.1.2. Unsur Ekonomi**

4 hipotesis ekonomi yang menjelaskan tentang perang antar negara: motivasi kelompok dalam kaitan dengan kesenjangan kelompok; motivasi dan insentif pribadi; kontrak sosial gagal, karena ekonomi gagal dan pelayanan pemerintah buruk; dan perang yang dipicu kerusakan lingkungan atau perang hijau'. Sudah lumrah, jaman sekarang ini, untuk mengatakan bahwa motivasi ekonomi diwakili oleh 'ketamakan' dan 'rasa tidak puas' menurut hasil penelitian Collier and Hoeffler dan Bank Dunia (2000)

---

<sup>11</sup>Stewart, Frances. *Sebab-sebab Dasar Sosial Ekonomi dan Konflik Politik dengan Kekerasan*.

(i) motivasi kelompok dan kesenjangan horizontal

Sebagian besar konflik dalam negeri terdiri dari baku hantam antar kelompok – kelompok yang ingin bebas atau mengambil alih pemerintahan dan kelompok yang menentang ini, karena ingin mempertahankan kendali dalam tangannya, dan integritas nasional (Horowitz 1985; Gurr 1993; Stewart, 2001). Dalam hampir semua konflik politik, motivasi kelompoklah yang penting.

Dalam berbagai kasus, kelompok-kelompok yang bertarung memiliki identitas budaya yang sama-yang bersumber, misalnya, pada ikatan kesukuan, 'ras,' atau agama. Bila kelompok juga dibedakan menurut wilayah tempat tinggal, konflik cenderung menjadi konflik separatis. Bila perbedaan budaya disertai perbedaan ekonomi dan politik antara kelompok, ini dapat menyebabkan kebencian yang dalam, yang dapat berujung dengan konflik kekerasan. Jika orang memang bertarung, di pihak lain, menurut garis suku, hampir selalu bahwa pertarungan itu untuk memperebutkan hal yang mendasar, menyangkut distribusi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan, apakah kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, atau kedua-duanya'(Cohen1974).

Perbedaan antar kelompok, yang disebut kesenjangan horisontal, karena ini dapat menjadi penyebab dasar dari perang. Kesenjangan horisontal terdiri dari sejumlah dimensi – ekonomi, politik, dan sosial. Kesenjangan geografis, terutama bila bertaur dengan perbedaan budaya, sering menimbulkan tuntutan untuk otonomi atau merdeka, seperti terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

(ii) motivasi perorangan

Perang membawa keuntungan bagi eprorangan, dan juga menimbulkan kerugian. Analisis Collier dan Hoeffler dan Bank Dunia (2000;2002), memberikan tekanan yang lebih besar pada motivasi pribadi atau perorangan sebagai penyebab dasar konflik. Menurut hipotesis 'motivasi pribadi,' keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh seseorang dari perang akan mendorongnya untuk ikut bertempur (Keen 1994, 1998; Collier 2000). Keen (1998) membuat daftar mengenai berbagai cara perang membawa keuntungan bagi perorangan menurut kategori tertentu manusia. Misalnya perang memungkinkan orang, terutama anak muda yang tidak berpendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan sebagai serdadu; membuka

kesempatan untuk menjarah; mendapat untung dari situasi kekurangan dan dari bantuan; berdagang senjata, dan memproduksi senjata secara ilegal

(iii) kontrak sosial gagal

Penjelasan ini menyangkut kegagalan negara memainkan perannya dalam kontrak sosial – dalam menyediakan manfaat ekonomi dan layanan sosial. Bila terjadi stagnansi ekonomi, atau kemunduran, dan layanan pemerintah memburuk, kontrak sosial tidak lagi berlaku, dan akibatnya muncul kekerasan.

(iv) hipotesis perang hijau

Secara spesifik, hipotesis ini menitik pada kerusakan lingkungan hidup sebagai sumber kemiskinan dan penyebab konflik (Horner – Dixon 1994; Kaplan 1994). Hipotesis perang hijau merujuk pada faktor-faktor spesifik dalam lingkungan hidup yang menyebabkan kemiskinan.

### **2.1.3. Unsur Politik**

Ada faktor-faktor politik yang dapat turut menimbulkan kekerasan, umumnya dalam kombinasi dengan faktor-faktor ekonomi dan budaya. Penjelasan politik yang sering dikemukakan (misalnya, Väyrynen 2000, Nafziger 2002; Addison dan Murshed 2000) adalah negara gagal, tidak mampu menegakkan hukum dan ketertiban atau menyediakan layanan pokok. Negara seperti itu dikaitkan dengan, dan turut bertanggung jawab atas timbulnya, beberapa faktor di atas, dan turut bertanggung jawab atas timbulnya stagnansi ekonomi dan menurunnya layanan masyarakat.

(i) Kesenjangan kelompok: Kesenjangan antar kelompok dalam peluang politik banyak ditemukan – akibatnya penggunaan kekerasan, bukan berupaya mengatasi perbedaan melalui perundingan politik.

(ii) Motivasi pribadi. Sejumlah studi kasus mendukung pandangan yang mengatakan bahwa motivasi pribadi memainkan peranan penting dalam memperpanjang, jika tidak menyebabkan, konflik di beberapa negara.

(iii) Kontrak sosial gagal. Bukti yang cukup banyak dari studi ekonometri menunjukkan bahwa konflik sering terjadi di negara berpendapatan per kapita rendah, harapan hidup rendah, dan pertumbuhan ekonomi rendah (Nafziger dan Auvinen 2000; elbadawi dan Sambanis 2001; Walter 2001; Collier 2000).

(iv) Hipotesis perang hijau. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konflik (Homer-Dixon 1994); Fairhead 2000; Kibreab 1996; André dan Platteau 1996).

Kesenjangan dalam kontrol politik merupakan elemen yang sangat lumrah dalam berbagai konflik. Karena itu sering timbul tuntutan memisahkan diri.<sup>12</sup>

## 2.2. Separatisme di Aceh

Separatisme di Indonesia terutama di Aceh tidak berakar jauh ke belakang dalam sejarah. Aceh dengan sepenuh hati mendukung perang kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 dan tahun 1950. Aceh memiliki reputasi yang harus dijaganya. Aceh terkenal dengan perlawanan yang diberikannya pada perluasan kekuasaan Belanda di wilayahnya dan kesulitan yang dihadapi Belanda dalam memadamkan perlawanan di situ, salah satu sebab mengapa Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah dieprtimbangkan pimpinan angkatan darat Belanda untuk diduduki kembali ketika terjadi revolusi Indonesia.

Para pemimpin agama di Aceh menyatakan Perang Suci melawan Belanda pada bulan Oktober 1945 dan pasukan dikirim ke selatan untuk melawan pasukan Belanda di Sumatera Utara. Untuk mengenang sumbangan Aceh ke dalam perang itu Aceh dengan bangga disebut Daerah modal dari Republik Indonesia, dan juga mendapat nama ini karena bantuan uang yang diberikan kepada revolusi Indonesia di tempat lain di negeri itu (modal 1960:46, 14). Para pemimpin politik dan militer di Aceh dan di Jakarta seia sekata pada waktu itu. Mereka bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama: mengusir Belanda.

Sejarah Aceh kemudian merupakan contoh dari kenyataan pahit yang menghantui dekade-dekade awal Republik Indonesia. Ketika substansi sebenarnya harus diberikan kepada struktur negara baru itu, ketika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus didefinisi dan ketika aturan main di bidang politik dan agama negeri itu harus diputuskan, konflik-konflik mendasar tidak dapat dielakkan. Di Aceh berbagai perselisihan pendapat mengenai persoalan-persoalan semacam itu berarti bahwa di bawah pimpinan Teungku Daud Beureuh'eh sebagian dari rakyat bangkit memberontak melawan pemerintah pusat dan diikuti oleh Darul Islam pada tahun 1953. Agama memainkan peranan dalam

---

<sup>12</sup> Ibid

keputusan untuk melakukan perlawanan itu, tetapi keengganan untuk menyerahkan otonomi hampir penuh yang telah dinikmati Aceh *de facto* selama Perang Kemerdekaan dan penolaan untuk tunduk pada instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pimpinan militer ternyata merupakan insentif yang lebih kuat.

Provinsi Aceh diberi status khusus oleh Jakarta pada tahun 1959 dalam rangka penyelesaian untuk mengakhiri pemberontakan Daud Beureu'eh. Aceh diberi otonomi seluas-luasnya dalam bidang agama, hukum adat dan pendidikan. Separatisme mengambil bentuk konkret ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM), atau seperti secara resmi menamakan dirinya sendiri, Front Nasional Pembebasan Aceh – Sumatra (Aceh-Sumatra National Liberation Front), berdiri pada tahun 1976.

Tetapi seiring dengan berkembangnya pemberontak terutama deklarasi separatis oleh GAM. Operasi militer, terutama pada tahun 1989 dan tahun 1998, periode saat diberlakukan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh yang menimbulkan perasaan benci di kalangan rakyat di sana. Sejarah perselisihan Aceh yang mutakhir menunjukkan betapa sulit menyelaraskan tuntutan-tuntutan bagi separatisme dengan integritas negara kesatuan, dan juga dengan negara federal.<sup>13</sup>

Kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia benar-benar nyata dan bersumber tidak saja pada amarah karena perlakuan-perlakuan tidak adil pada masa lalu, tetapi juga perasaan bahwa Jakarta tidak memperlakukan penduduk di kedua wilayah itu secara bermartabat dan rasa hormat yang sepatutnya mereka dapatkan.

Dimasa sebelum Presiden Soeharto jatuh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanpa sengaja sudah dapat memasukkan kembali sejumlah pejuang-pejuangnya dari pengasingan, melalui deportasi sekitar 500 imigran ilegal Aceh dari Malaysia. Malaysia secara efektif merupakan tempat GAM mendirikan markas operasi menjelang akhir periode Orde Baru, dan banyak pejuang yang berbasis di situ yang kembali ke Aceh setelah Soeharto mundur, dan mulai dengan aktif mencari

---

<sup>13</sup> Van Dijk, Kees. *Mengatasi Separatisme, Apakah ada jalan keluar?*

dukungan melalui mesjid dan surau, yang sebelumnya ada berbagai pembatasan dari pihak yang berwenang.

Pada masa pemerintahan Habibie, setelah Habibie membuat pernyataan mengenai Timor Timur, kelompok-kelompok mahasiswa di Aceh, yang baru saja mencapai 'kemanangan' dalam menjatuhkan Soeharto, mengadakan konferensi se-Aceh untuk menuntut diadakannya referendum bagi Aceh. Untuk sementara, ide ini meluas seperti api belukar, dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya, GAM memiliki basis massa, yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa setiap orang di Aceh mendukung GAM, bahkan ini tidak berarti bahwa GAM sendiri mendukung referendum – tetapi dinamika politik membawa GAM dan gerakan politik untuk kemerdekaan lebih dekat satu sama lain daripada sebelumnya.<sup>14</sup>

### **2.3. Resolusi konflik untuk mencapai perdamaian**

Menurut K.J. Veeger, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.

Studi konflik memiliki dua fokus perhatian (John Burton) , yaitu :

- pertama, menjelaskan gejala konflik dan kekerasan didalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya
- kedua, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik.

Resolusi konflik (Burton) adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Membuat keputusan mejadi salah satu elemen penting dalam resolusi konflik. Seiring dengan perubahan jaman pengambilan keputusan dalam resolusi konflik juga turut mengalami transisi. Kebijakan di segala tingkat sosial, kebijakan pribadi dan kebijakan nasional, merupakan hal yang dituju

---

<sup>14</sup> Jones, Sidney. *Pentingnya pemerintahan yang baik untuk mengatasi konflik separatis*.

sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan. Keputusan yang akan diambil dalam resolusi konflik berdasarkan asumsi, pengetahuan, filsafat, ideologi, dan kepentingan yang timbul pada pihak yang akan terlibat dalam resolusi konflik.

Menurut Lewis A. Coser, ada 6 cara untuk penyelesaian konflik yakni :

1. menciptakan federasi. Upaya ini dilakukan dengan memberi otonomi relatif kepada unit-unit yang ada. Ini berangkat dari faktor-faktor yang memungkinkan munculnya konflik, adanya heterogenitas, sehingga perlu federasi.
2. mengubah hasil yang dikehendaki. Upaya ini dilakukan terutama terhadap ciri konflik yang menang-kalah (*zero sum conflict*) yang intensitasnya tinggi. Agar intensitasnya lebih rendah, struktur konfliknya harus diubah menjadi *non zero sum conflict* agar tercipta kompromi dan konsensus.
3. memperluas sumber-sumber. Cara ini dilakukan dengan memperluas sumber-sumber yang dipertentangkan. Perluasan ini diharapkan dapat meredakan konflik.
4. memberikan bayaran tambahan. Pihak-pihak yang kalah dalam konflik diberi “subsidi,” atau sejumlah kompensasi agar tidak tercipta oposisi politik.
5. memperbaiki pola-pola komunikasi. Konflik seringkali menyebabkan penguatan terhadap masing-masing pihak. Agar konflik tidak selalu antagonistik, cara mengalihkan pola komunikasi yang bersifat antagonistik dapat dilakukan.
6. mendefinisikan kembali konflik. Hal ini dilakukan terhadap konflik yang cenderung berubah dari konflik yang bersifat khusus ke konflik yang bersifat umum, maka konflik harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus, agar mudah penyelesaiannya.

Mengembangkan kegiatan perdamaian itu tidak mudah. Ada beberapa tahapan atau perkembangan yang dapat kita amati yaitu:

- a) *Peace making (conflict resolution)* yaitu memfokuskan pada penyelesaian masalah-masalahnya (isunya: persoalan tanah, adat, harga diri, dsb.) dengan pertama-tama menghentikan kekerasan, bentrok fisik, dll. Waktu yang diperlukan biasanya cukup singkat, antara 1-4 minggu.

Usaha *peace making* adalah usaha yang dilakukan oleh suatu pihak untuk berusaha menghentikan konflik (*conflict intervention*), melalui lobi-lobi, negosiasi, diplomasi.

- b) *Peace keeping (conflict management)* yaitu menjaga keberlangsungan perdamaian yang telah dicapai dan memfokuskan penyelesaian selanjutnya pada pengembangan/atau pemulihan hubungan (*relationship*) yang baik antara warga masyarakat yang berkonflik. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, sehingga dapat memakan waktu antara 1 – 5 tahun.
- c) *Peace building (conflict transformation)*. Dalam usaha *peace building* ini yang menjadi fokus untuk diselesaikan atau diperhatikan adalah perubahan struktur dalam masyarakat yang menimbulkan ketidak-adilan, kecemburuan, kesenjangan, kemiskinan, dsb. Waktu yang diperlukanpun lebih panjang lagi, sekitar 5 – 15 tahun.<sup>15</sup>

Para ahli studi konflik mendefinisikan resolusi konflik dengan penekanannya masing-masing. Menurut Peter Wallensteen definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.

#### **2.4. Mediasi sebagai Instrumen Negosiasi Perdamaian**

Peran pihak ketiga sangat tepat dilaksanakan pada sebuah konflik yang berlangsung lama terutama apabila terjadi kebuntuan dalam mencapai

---

<sup>15</sup> Poerwowidagdo, Judo (2003, February 7), Mengantisipasi Konflik dalam Masyarakat, <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Mengantisipasi%20Konflik%20dalam%20Masyarakat.htm>

penyelesaian konflik. Zartman dan Rasmussen (1997) mengatakan bahwa keadaan buntu tersebut membuat pihak yang saling bertikai berpandangan bahwa mereka tidak bisa menang dengan berperang, tetapi tidak juga memiliki kecenderungan untuk mencari perdamaian. Dalam keadaan inilah pihak ketiga dibutuhkan untuk memiliki inisiatif guna mencari perdamaian, yaitu menjadi pemimpin sidang ataupun mediator dalam proses negosiasi untuk menghilangkan kebuntuan yang terjadi.

Dalam usaha untuk mengembangkan adanya perdamaian yang lestari, atau adanya rekonsiliasi, maka metode yang dipakai oleh pihak ketiga sebaiknya adalah mediasi dan bukan arbitrase. Mediasi merupakan suatu bentuk intervensi pihak ketiga dalam konflik. Mediasi bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan konsisten dengan kesepakatan tersebut.<sup>16</sup>

Mediasi merupakan upaya menyelesaikan konflik secara damai, yaitu bersifat tidak memaksa (*noncoerceive*) dan tidak memakai kekerasan (*non-violence*). Mediasi bersifat sukarela, mereka harus diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, hal ini menurut Harris and Reilly (2000) biasa dikenal dengan kenetralan dan imparisialitas pihak ketiga. Netral di sini bukan hanya sekedar tidak memihak akan tetapi juga bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi.

Dalam arbitrase, pihak ketiga (pendamai) yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bertentangan/berkonflik itu, setelah mendengarkan masing-masing pihak mengemukakan masalahnya, maka si arbitrator ”mengambil keputusan dan memberikan solusi atau penyelesaiannya, yang ”harus” ditaati oleh semua pihak yang berkonflik.<sup>17</sup>

Penyelesaian konflik melalui jalan arbitrase mungkin lebih cepat diusahakan, namun biasanya tidak lestari. Apalagi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, dikalahkan atau merasa bahwa kepentingannya diindahkan.

Sebaliknya, mediasi adalah suatu cara intervensi dalam konflik dimana mediator (fasilitator) dalam konflik ini juga harus mendapat kepercayaan dari pihak yang berkonflik.

---

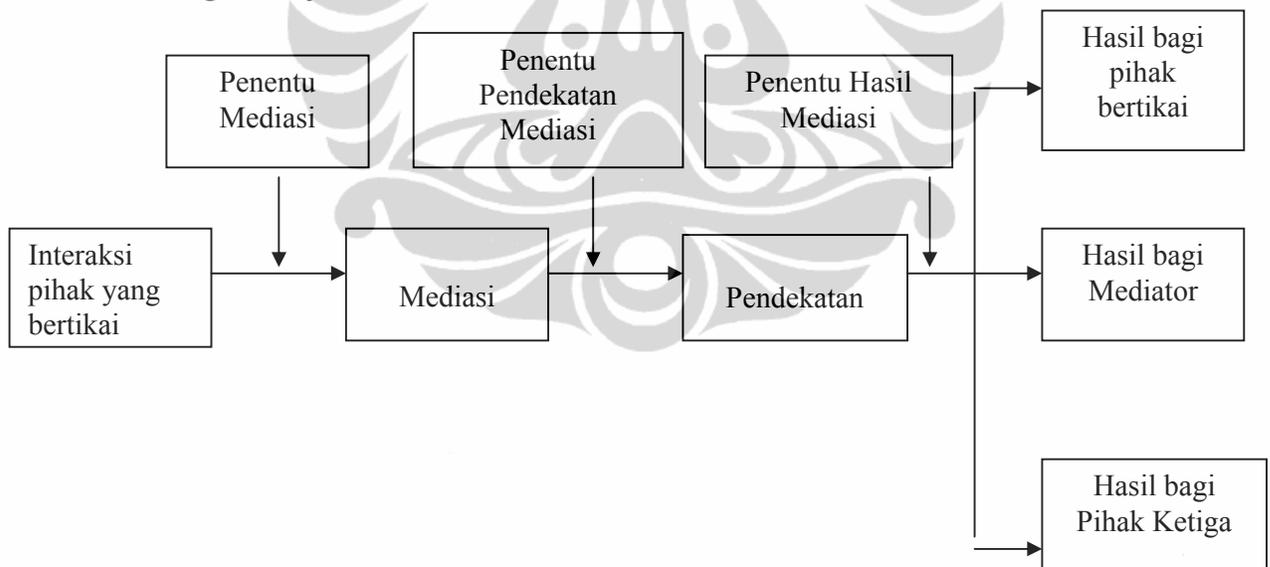
<sup>16</sup> Jurnal Phobia, (Januari 2010), *Mediation as Negotiation Instrument*.

<sup>17</sup> Poerwowidagdo, loc.cit

Untuk mencapai tujuannya, mediasi harus membuat penerimaan menjadi mungkin bagi para penasihat dalam konflik. Namun mediator seringkali menemui penolakan awal dari pihak-pihak yang berkonflik; maka usaha diplomasi awal haruslah mempersuasi pihak-pihak dengan nilai dari pelayanan mereka sebelum proses mediasi dimulai.

Mediator menggunakan tiga model untuk mengatur kepentingan semua pihak yang berada dalam konflik, yakni : komunikasi, formulasi dan manipulasi.<sup>18</sup> Ketika mediasi terjadi tanpa adanya keinginan satu atau bahkan kedua belah pihak untuk menang dari lainnya, mediator dapat menempatkan dirinya sebagai komunikator untuk menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Namun ketika terjadi perselisihan antar pihak yang mengikuti mediasi, mediator diharapkan mengambil pilihan kedua sebagai formulator untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sementara pilihan ketiga hanya akan diambil ketika pihak-pihak tersebut saling berselisih dalam taraf yang ekstrim.

#### Kerangka Kerja Mediasi<sup>19</sup>



Literatur mediasi pada dekade terakhir ini disusun dalam enam area topikal: faktor-faktor penentu mediasi, mediasi per se (pada hakekatnya, sendiri),

<sup>18</sup> Jurnal Phobia, loc.cit

<sup>19</sup> James A. Wall, Jr, *Mediation, a Current Review and Theory Development* (University of Missouri – Columbia)

pendekatan yang digunakan oleh mediator, faktor-faktor penentu dari pendekatan mediasi, dan hasil sangat deskriptif dari teori.

Asal-usul mediasi adalah interaksi antara dua atau lebih pihak yang mungkin bersengketa, negosiator, atau pihak yang berinteraksi yang hubungannya dapat ditingkatkan oleh intervensi mediator. Dalam berbagai kondisi (faktor-faktor penentu mediasi), kelompok-kelompok / atau pihak yang bersengketa memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak ketiga, dan partai ini memutuskan apakah untuk menengahi. Selama mediasi akan berlangsung, pihak ketiga memilih dari sejumlah pendekatan yang tersedia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (penentu pendekatan), seperti lingkungan, pelatihan mediator, karakteristik bersengketa, dan sifat konflik mereka.

Dalam review berikut, kita membahas topik yang telah disebutkan sebelumnya dalam urutan yang ditunjukkan pada gambar – yaitu, faktor-faktor penentu mediasi, mediasi itu sendiri, pendekatan yang digunakan, faktor-faktor penentu pendekatan mediasi, hasil mediasi, dan faktor-faktor penentu hasil mediasi.

Begitu diterapkan, pendekatan ini memberikan hasil bagi pihak yang bersengketa (misalnya, kepuasan, sebuah persepsi perlakuan yang adil), mediator, dan pihak ketiga (selain mediator). Seperti gambaran tersebut menunjukkan, sifat dan tingkat pengaruh ini telah diredakan oleh faktor-faktor seperti intensitas dari perselisihan tersebut, kekuatan relatif dari pihak yang bersengketa, dan jenis masalah.

Unsur-unsur yang berhubungan sepanjang sumbu horisontal pada Gambar 1 (yaitu, mediasi per se, pendekatan, dan hasil) biasanya tercantum atau digambarkan dalam literatur. Sebaliknya, segmen-segmen dengan link vertikal - penentu mediasi, pendekatan, dan hasil - memiliki beberapa teoretis penentu. Kita mulai dengan pengamatan terhadap faktor-faktor penentu mediasi.

Seperti catatan dari buku harian Ahmad Ibn Fadlan di tahun 922 mengungkapkan, mediasi memiliki akar sejarah yang panjang, dan tinjauan terbaru menunjukkan bahwa telah digunakan secara ekstensif selama puluhan tahun untuk menyelesaikan konflik (Wall 1981; Wall dan Lynn 1993).

Mediasi adalah bantuan kepada dua atau lebih pihak yang berinteraksi (Kressel dan Pruitt 1989) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang (biasanya) tidak punya kewenangan untuk memaksakan suatu hasil. Mediasi merupakan salah satu bentuk tertua dari resolusi konflik dan telah digunakan di berbagai tempat di dunia.

Sekarang metode kuno ini dan secara internasional menggunakan proses manajemen konflik yang diandalkan untuk mengelola konflik di berbagai arena. Secara khusus, mediasi dipakai dan dipelajari dalam hubungan internasional (misalnya, Bercovich 1996), negosiasi buruh-manajemen (misalnya, Mumpower dan Rohrbaugh 1996), komunitas sengketa (misalnya, Pruite et al. 1993), konflik sekolah (misalnya, Johnson et al 1995)., dan sengketa hukum (misalnya, Riskin 1996).

### **Penentu Mediasi**

Agar mediasi terjadi, dua proses harus saling bertautan. Pertama, interaksi / pihak yang bersengketa harus meminta atau mengizinkan keberadaan pihak ketiga untuk menengahi, kedua, pihak ketiga harus setuju untuk menengahi.

Literatur menunjukkan bahwa dua faktor adalah faktor- yaitu norma dan manfaat yang diharapkan – membentuk dua proses saling tergantung ini. Pertimbangan norma pertama, yang sering tertanam dalam budaya. Penjelasan untuk tindakan ini - didukung oleh keberhasilan teori budaya - bahwa pihak yang bersengketa di negara-negara di dunia telah berulang kali diamati perselisihan yang sedang ditangani oleh pihak ketiga, dan mereka tahu bahwa masyarakat mereka meragukan pendekatan ini. Ketika mediasi dibutuhkan, pihak yang bersengketa harus dan menghadiri pertemuan (Thoennes, Salem, dan Pearson 1995).

Pihak yang bersengketa meminta bantuan pihak ketiga karena mereka berharap hal ini akan menghasilkan berbagai manfaat. Misalnya, pihak yang bersengketa mungkin menyadari bahwa mediator memiliki pengalaman pada masalah yang dihadapi, atau mungkin memiliki metode untuk mengatasi kebuntuan (Silver 1996), bisa membantu dalam membangun hubungan positif

antara pihak-pihak yang bertikai (Scherer 1997), atau yang memungkinkan para pihak untuk mengendalikan konflik mereka sendiri (Stamato 1992).

Beralih dari pihak berinteraksi kepada pihak ketiga, kita menemukan bahwa mediasi dari pihak-pihak yang bertikai juga disebabkan oleh norma-norma, dan manfaat yang diharapkan. Kita dapat mencatat dari laporan literatur bahwa beberapa pihak ketiga memediasi karena mempunyai manfaat untuk diri mereka sendiri (Vanayan et al 1997).

## **2.5. Perbedaan antara mediator dan fasilitator :**

Perbedaan fasilitator dan mediator adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitator** adalah pihak yang bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak, tapi tidak ikut terlibat didalamnya.
- b. Mediator** adalah pihak bertugas untuk mempertemukan kedua belah pihak, tapi dia ikut terlibat dalam pertemuan.

Menurut Bercovitch (1996), beberapa macam aktivitas yang dilakukan mediator dalam menengahi konflik tersebut antara lain :

### 1. Preparasi

Tahap prenegosiasi ini penting. Mediator bebas untuk mengeksplorasi agenda-agenda yang menjadi pilihan dan mengembangkan pengertian dan kebiasaan berdialog diantara yang berkonflik melalui hubungan personal diantara mediator dengan masing-masing pihak yang berkonflik. Ketika kepercayaan diantara kedua belah pihak sudah mulai berkembang dan mengindikasikan adanya kebaikan maka mediator membawa ke dalam struktur formal mereka, yaitu menuju kepada negosiasi sepenuhnya dalam proses perdamaian resmi.

### 2. Inisiatif

Pada tahap inisiatif ini, aktivitas mediasi adalah mempersiapkan inisiatif proposal perdamaian, memprakarsai, membantu untuk menjalankan perundingan diantara pihak yang bertikai. Inisiatif-inisiatif perdamaian dilakukan sebagai upaya untuk menuju proses negosiasi.

### 3. Negosiasi

Aktivitas mediasi dalam tahap ini adalah membuat diterimanya negosiasi bagi pihak yang bertikai, meliputi memberikan legitimasi dan pilihan dalam

penyelesaian. Kelompok yang bertikai dalam negosiasi meminta mediator untuk menyelenggarakan negosiasi tersebut karena usulan dapat dengan mudah diterima oleh kelompok yang bertikai jika diajukan oleh mediator.

#### 4. Implementasi

Mediator melakukan monitoring/pengawasan terhadap beberapa kesepakatan perjanjian termasuk menerapkan sangsi-sangsi bagi kelompok-kelompok yang melanggar perjanjian demi terjaminnya kesepakatan perjanjian tersebut.

Tugas mediator adalah memfasilitasi adanya dialog antara pihak yang berkonflik, sehingga semuanya dapat saling memahami posisi maupun kepentingan dan kebutuhan masing-masing, dan dapat memperhatikan kepentingan bersama.

Jalan keluar atau penyelesaian konflik harus diusulkan oleh atau dari pihak-pihak yang berkonflik. Mediator sama sekali tidak boleh mengusulkan atau memberi jalan keluar/penyelesaian, namun dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat mengusulkan atau menemukan jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator tidak boleh memihak, harus 'impartial', atau tidak bias, dsb.

Mediator harus juga memperhatikan kepentingan-kepentingan *stakeholders*, yaitu mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, tetapi juga mempunyai kepentingan-kepentingan dalam atau atas penyelesaian konflik itu. Kalau *stakeholders* belum diperhatikan kepentingannya atau kebutuhannya, maka konflik akan dapat terjadi lagi, dan akan meluas serta menjadi lebih kompleks dan dapat berlangsung dengan berkepanjangan.

#### Teknik-teknik Mediasi<sup>20</sup>

No.	Teknik	Contoh
1	<b>Orientasi terhadap pihak bertikai</b> Pengumpulan informasi Ketegasan	Dari pihak yang bertikai atau dokumen tertulis

<sup>20</sup> James A. Wall, Jr, Mediation, a Current Review and Theory Development (University of Missouri – Columbia), 376

	Kompensasi Pendidikan/Nasihat  Refleksif Pemberdayaan  Distributif Tanpa kegiatan	Mempengaruhi suatu pihak dengan cara tertentu Memberikan kelonggaran Memberlakukan perjanjian khusus atau kelonggaran Menggunakan humor atau hal-hal ringan Menyarankan kepada para pihak yang bertikai untuk mencapai solusi mereka sendiri Mengkritik posisi suatu pihak Mengawasi pihak yang bertikai dengan sederhana
2	<b>Hubungan pihak bertikai</b> Ramah dan sabar Agenda Keberpihakan Integrasi Penyelesaian masalah Perwakilan	Membangun kepercayaan Bertemu pihak-pihak yang bertikai bersama-sama Memberi masukan kasus satu pihak ke pihak lain Isu-isu Melihat kenyataan di dalam masalah Meminta satu pihak untuk melihat posisi orang lain
3	<b>Hubungan pihak ketiga dan pihak bertikai</b> Menggunakan pihak ketiga	Mendapatkan bantuan dari pihak ketiga

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mediasi adalah sebagai berikut:

1. teknik yang dilakukan
2. analisis kerugian dan keuntungan mediasi

3. strategi keputusan dari mediator
4. tujuan mediator

## **2.6. Netralitas mediasi**

Mediator merupakan pihak yang mencoba membantu menyelesaikan konflik, mencari cara untuk mempercepat dan mengakhiri kekerasan atau perilaku destruktif lainnya dan membantu mencapai penyelesaian yang abadi dan adil. Upaya-upaya mediasi tersebut bila dilakukan dengan baik dapat menjadi efektif dalam berbagai konflik. Praktek sebagai mediator dapat mempengaruhi arah konflik dan penyelesaiannya.

Masalah netralitas mediator juga menjadi faktor penting dalam proses negosiasi. Banyak mediator dan analis mediasi menekankan bahwa mediator harus netral saat memainkan peran sebagai mediator. Yang lainnya berpendapat bahwa netralitas tidak mungkin didapatkan dalam proses negosiasi. Dapat dipercaya dan jujur dengan pihak yang bersengketa membuat peran mediator menjadi efektif.

Netralitas mediator bisa merujuk kepada perasaan dan niat. Netralitas memberikan efek pada program penyelesaian sengketa dan konflik. Apa pun netralitas mediator tentang perselisihan, tindakan mereka akan memberikan implikasi untuk jenis penyelesaian tercapai, sehingga mempengaruhi hasil konflik. Lebih sering, para mediator cenderung memiliki perasaan dan kepentingan untuk bersimpati terhadap satu kelompok dibandingkan dengan yang lain. Beberapa mungkin berusaha keras untuk bertindak secara adil untuk kedua belah pihak; tapi ada juga yang membantu pihak yang lain dari pada pihak yang satu lagi.

Bagaimana para pihak yang bersengketa melihat niat para mediator, tindakan, berdampak pada efektivitas mediator. Beberapa mediator, yang di masa lalu mempunyai hubungan dengan satu pihak dalam konflik, dapat dianggap terlalu bias atau tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebagai mediator. Seringkali, netralitas tidak diinginkan. Satu atau lebih pihak dapat memilih seorang mediator yang dapat memperbesar pembagian 'kue' yang akan dibagi, yang dapat memberikan memanfaatkan pada satu pihak.

Efektif atau tidaknya mediasi, bisa juga tergantung pada sifat dan tahap konflik, pihak yang bersengketa, dan hubungan antara pihak yang bersengketa satu sama lainnya. Semakin terintegrasi hubungan antara pihak yang bertikai, semakin baik prospek dari mediasi. Semakin intens konflik kekerasan dilancarkan, semakin besar kesulitan dalam melakukan mediasi dan melakukannya secara efektif. Tetapi jika pihak pemberontak melihat bahwa mereka tidak dapat memaksakan kemenangan dan mulai untuk mencari jalan keluar, mediasi yang efektif mulai dapat dijalankan. Konflik di mana satu sisi lebih kuat daripada yang lain lebih sulit untuk menengahi daripada konflik di mana lawan relatif sama.

Banyak kondisi lain yang berkaitan dengan proses mediasi, mediator, dan hubungan yang tidak baik dengan mediator mungkin mempengaruhi efektivitas upaya mediasi. Tentu saja, mediasi bukanlah obat mujarab untuk semua konflik. Hal ini dapat memberikan kontribusi penting, untuk mencegah atau mengendalikan konflik.

Tindakan mediasi berkontribusi pada perbaikan dan resolusi konflik. Termasuk intervensi untuk memisahkan kelompok-kelompok yang bertarung. Kadang-kadang hal ini dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang bertikai. Usaha mediasi lain dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran tersebut.

## **2.7. *Multi track diplomacy***

Banyak konflik mungkin memerlukan strategi multi-track mediasi di mana negosiasi antara para pemimpin faksi-faksi yang berperang (mediasi *track 1*) yang dilengkapi dengan dialog dibantu pihak ketiga ( mediasi *track II*, melibatkan tokoh-masyarakat sipil dan organisasi).

Kebanyakan mediator tidak bekerja sama satu dengan yang lain untuk memaksimalkan kekuatan mereka dalam fase konflik yang berbeda. Dalam mediasi *multitrack* kompleks, penting untuk memahami aktor mana yang dapat menambah nilai nyata bagi proses perdamaian dan dalam keadaan mana mereka dapat melakukan proses perdamaian. Ketika kekerasan belum meningkat, pihak – pihak yang bertikai dapat terbuka terhadap intervensi oleh berbagai mediator. Di

titik ini, tantangan utama adalah untuk membangun komunikasi langsung antara pihak.<sup>21</sup>

Michael Bavly mengatakan *track-two diplomacy* menggabungkan usaha-usaha resolusi konflik yang dibuat oleh profesional, yang terinformasikan dengan baik. Personil yang berkomitmen khusus memiliki hubungan dekat dan pembuat kebijakan.

Artikel ini juga memberi perhatian mengenai kasus dimana kerjasama antara *Track-two* dan *Track-one* membuahkan hasil. Bavly, berpendapat bahwa praktisi *Track-two* paling dekat dengan pembuat kebijakan. Setelah penelitian yang sangat persiapan tampaknya seolah-olah telah sukses sangat tergantung pada kerjasama yang erat dan keberlanjutan antara *track-two* dan *track one*.

Perpaduan *track one* dan *track two* bisa saling melengkapi dalam proses negosiasi *Track two* dapat mempersiapkan pekerjaan dasar bagi perundingan resmi. Di lain waktu, negosiasi sebenarnya dapat dimulai dalam jalur *non-official* dan kemudian diserahkan ke negosiasi yang resmi. Kadang-kadang, jalur diplomatik menemui kebuntuan, dan sebuah jalur baru dibuka secara informal. Ketika kemajuan didapat, negosiasi dikembalikan ke saluran resmi.

Pertemuan dan pembicaraan resmi dan tidak resmi saling melengkapi kegiatan-kegiatan dalam negosiasi. Cara ini terjadi ketika *track one* dan *track two* dilakukan secara paralel.

## **2.8. Faktor keberhasilan mediasi**

Keberhasilan pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator tergantung pada kredibilitas dan peran yang dimilikinya, serta pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang relevan adalah pendekatan bebas nilai (*non-judgmental*) yang didasarkan pada kepercayaan yang dimiliki pihak ketiga. Selain itu fleksibilitas yang berkaitan dengan kemampuan aktor pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan masalah. Karena itu, mekanisme dan fleksibilitasnya serta independensi amat menentukan posisi pihak ketiga.

---

<sup>21</sup> Lassila, Jani. (2006, June). *Multi-track, Track two and Track 1,5 diplomacy?* CMI Background paper2/2006

Successful mediation strategy has five elements :

- *Coherence: good mediation strategy starts with a careful plan and a clear set of objectives.*
- *Complexity and coordination: resolving most of today's conflicts requires the involvement of, and coordination among, several kinds of intermediaries over the life cycle of the conflict.*
- *Consistency and staying power: mediators must not end their involvement as soon as an agreement is signed, and need to ensure continuity during the implementation period<sup>22</sup>.*
- *Capacity and competence : mediator readiness is a prerequisite for successful peacemaking.*
- *Commitment to using preventive diplomacy to resolve conflicts before they spread.*

## 2.9. Hasil dari mediasi

Hasil-hasil yang bisa dicapai karena mediasi bisa ditunjukkan dalam table dibawah<sup>23</sup> :

No	Penerima	Hasil
1	<b>Pihak yang bertikai</b>	Perjanjian Kepuasan Efisiensi Hubungan membaik Prosedur keadilan Perjanjian khusus Pemberdayagunaan Meningkatkan penyelesaian masalah Implementasi

<sup>22</sup> Nurhasim, Moch. (2008, April). *Konflik dan Integrasi Politik, Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI – GAM dalam Perundingan Helsinki*. Yogyakarta

<sup>23</sup> James A. Wall, Jr, *Mediation, a Current Review and Theory Development* (University of Missouri – Columbia), 381

2	<b>Mediator</b>	Reputasi Keahlian social
3	<b>Pihak ketiga</b>	Waktu untuk kegiatan lain Perdamaian dan mengurangi kekerasan Perjanjian khusus

Melalui negosiasi yang baik, konflik tidak hanya dapat dihilangkan. Setelah terjadi banyak kekerasan, setelah perjuangan panjang yang dilancarkan selama puluhan tahun, konflik dapat berhenti dan mencapai suatu hasil. Hasilnya bisa menjadi dasar untuk hubungan yang baru yang lebih baik. Akhir dari proses negosiasi dapat ditulis dalam suatu perjanjian. Hasil dari konflik, bukan hanya perjanjian tetapi juga penghentian kekerasan dari pihak yang bertikai. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian para peneliti pada hasil-hasil perdamaian mulai meningkat. Juga perhatian terhadap resolusi dalam menyelesaikan atau mengakhiri konflik.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kriesberg, Louis. (1998). *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. New York. Oxford. 254